



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

NOMOR : P.10/PKTL/SET-2/KEU.1/11/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN NOMOR P.1/PKTL/SETDT /KEU.0/1/2020 TENTANG PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.1/PKTL/SETDT/KEU.0/1/2020 sebagaimana telah diubah dengan P.6/PKTL/SETDT/KEU.0/5/2020 ditetapkan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Tahun 2020;
 - bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor : S-55/AG/AG.3/2020 tanggal 10 September 2020 hal Revisi Tambahan Anggaran T.A. 2020 Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Nomor : S-143/AG/AG.3/2020 tanggal 7 Oktober 2020 hal Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK);
 - bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 huruf E. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :
 - 1) Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
 - 2) Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sarasan (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
 - 3) Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.1/PKTL/SETDT/KEU.0/1/2020 tentang Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang merupakan wujud nyata dalam memerangi korupsi secara represif dan preventif;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 203);
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.173/Menlhk-II/2015 Tentang Penunjukan Unit Induk Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
6. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.13/PKTL/SETDIR/ KEU.0/12/2019 Tentang Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun 2020 Satker lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN NOMOR P.1/PKTL/SETDIR/KEU.0/1/2020 TENTANG PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2020.

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/SETDIR/KEU.0/5/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.1/PKTL/SETDIR/KEU.0/1/2020 tentang Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020, diubah sebagai berikut:

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.1/PKTL/SETDIR/KEU.0/1/2020 tentang Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan P.6/PKTL/SETDIR/KEU.0/5/2020 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II ...

Pasal II

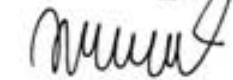
Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2020

DIREKTUR JENDERAL PLANLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
dan Kerjasama Teknik,

ttd.



SRIWATI
NIP.19681125 199403 2 002

SIGIT HARDWINARTO
NIP. 19610202 198603 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
**SATUAN KERJA : 465013. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**
**ESELON II : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN**

No./Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi.	
5432.950.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1.	Terlanyaninya dukungan manajemen Eselon 1.	1 Layanan
5432.950.001.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lingkup Sekretariat Ditjen.	Terlanyaninya dukungan manajemen pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat Ditjen :	1 Layanan
		051. Penyusunan rencana dan penyusunan rencana anggaran.	
		052. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.	
		053. Pengelolaan data dan infomasi.	
		054. Pengelolaan keuangan.	
		056. Pelayanan hukum dan kepatuhan internal.	
		057. Pengelolaan kepegawaian	
		058. Pelayanan umum dan perlengkapan.	
		061. Pelayanan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi.	
5432.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal.	Terlanyaninya kebutuhan sarana prasarana internal	1 Layanan
5432.951.001	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Satker Pusat.	Terlanyaninya Sarana dan Prasarana Internal Satker Pusat	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran.	Terlanyaninya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji berserta tunjangannya dan operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
		001. Gaji dan Tunjangan.	1 Layanan
		002. Operasional dan pemeliharaan kantor.	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Rp. 67.796.303.000,- (Enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga ribu rupiah).

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. R.A. Belinda Arunarwati M., M.Sc.
Jabatan : Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya
Hutan
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sigit Hardwinarto".

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Belinda Arunarwati".

Dr. Ir. R.A. Belinda Arunarwati M., M.Sc.
NIP. 19681101 199303 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
 SATUAN KERJA : 465013. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
 KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
 ESELON II : DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi.	
5432.950.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.	Terlaiyaninya dukungan manajemen Eselon I.	1 Layanan
002.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lingkup Direktorat Teknis.	Terlaiyaninya dukungan manajemen pelaksanaan tugas lingkup Direktorat IPSDH.	1 Layanan
		052. Dukungan manajemen Direktorat IPSDH.	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran.	Terlaiyaninya kebutuhan kantor operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
		002. Operasional dan pemeliharaan kantor.	1 Layanan
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.	Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan.	
5434.001.	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan.	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH nasional dan KPH.	1 Dokumen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Rp. 748.527.000,- (Tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.	Rp. 3.466.891.000,- (Tiga milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
Jumlah	Rp. 4.215.418.000,- (Empat milyar dua ratus lima belas juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Direktur Inventarisasi dan
Pemantauan Sumber Daya Hutan,

Dr. Ir. R.A. Belinda Arunarwati M, M.Sc.
NIP. 19681101 199303 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Ary Sudijanto, MSE.
Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sigit Hardwinarto".

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ary Sudijanto".

Ir. Ary Sudijanto, MSE.
NIP. 19681011 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN KERJA : 465013. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
ESELON II : DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN
KEGIATAN

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi.	
5432.950.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.	Terlonyanya dukungan manajemen Eselon I.	1 Layanan
5432.950. 002.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lingkup Direktorat Teknis.	Terlonyanya dukungan manajemen pelaksanaan tugas lingkup Direktorat PDLUK.	1 Layanan
		054. Dukungan manajemen Direktorat PDLUK.	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran.	Terlonyanya kebutuhan kantor operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
		002. Operasional dan pemeliharaan kantor.	1 Layanan
5437.	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap usaha dan kegiatan.	
5437.001.	Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan.	Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	49 Dokumen
5436.006.	Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan Dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi.	Tersusunnya dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan Dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi	1 Dokumen (3 Provinsi)

Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Jumlah**Anggaran**

- Rp. 733.150.000,- (Tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
Rp. 6.867.946.000,- (Enam milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
Rp. 7.601.096.000,- (Tujuh milyar enam ratus satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Direktur Pencegahan Dampak
Lingkungan Usaha dan Kegiatan,



Ir. Ary Sudijanto, MSE.
NIP. 19681011 199403 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Roosi Tjandrakirana, M.SE.
Jabatan : Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Roosi Tjandrakirana, M.SE.
NIP. 19650416 199103 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
**SATUAN KERJA : 465013. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**
**ESELON II : DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH
PENGELOLAAN HUTAN**

No./Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi.	
5432.950.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.	Terlaiyannya dukungan manajemen Eselon I.	1 Layanan
5432.950.002.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lingkup Direktorat Teknis.	Terlaiyannya dukungan manajemen pelaksanaan tugas lingkup Direktorat RPPWPH.	1 Layanan
		051. Dukungan manajemen Direktorat RPPWPH.	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran.	Terlaiyannya kebutuhan kantor operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
		002. Operasional dan pemeliharaan kantor.	1 Layanan
5435.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.	Tersedianya data dan informasi penataan ruang, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.	
5435.001.	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.	Terlaiyannya permohonan penggunaan KH khususnya dalam rangka ketahanan energi, pangan dan air.	300 Dokumen
5435.002.	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan KPH.	530 Peta
5435.004.	Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030.	Tersedianya data dan informasi penataan ruang, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.	11 Dokumen
5435.007.	<i>Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Base Natural Resources Management and Institutional Development Project.</i>	Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan KPH yang pembayarannya bersumber dari dana HLN.	1 Laporan
5435.011.	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Tersusunya data areal perhutanan sosial wilayah Jawa.	1 Dokumen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Rp. 781.886.000,- (Tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.	Rp. 25.950.713.000,- (Dua puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).
Jumlah	Rp. 26.732.599.000,- (Dua puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

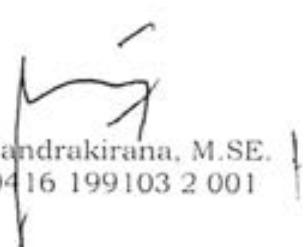
Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Direktur Rencana, Penggunaan dan
Pembentukan Wilayah Pengelolaan
Hutan,

Ir. Roosi Tjandrakirana, M.S.E.
NIP. 19650416 199103 2 001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
Jabatan : Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN KERJA : 465013. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
ESELON II : DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi.	
5432.950.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Terlayaninya dukungan manajemen Eselon I.	1 Layanan
5432.950.002.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lingkup Direktorat Teknis.	Terlayaninya dukungan manajemen pelaksanaan tugas lingkup Direktorat PPKH.	1 Layanan
		053. Dukungan manajemen Direktorat PPKH.	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran.	Terlayaninya kebutuhan kantor operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
		002. Operasional dan pemeliharaan kantor.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan	
5433.001.	Kawasan Hutan yang telah selesai ditetapkan.	Terselesaikannya penetapan kawasan hutan sebesar 80 % dari seluruh kawasan hutan.	5 Juta Ha
5433.002.	Kawasan Hutan sebagai Obyek TORA.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA.	46.500 Ha
5433.004.	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.	Terselesaikannya informasi dan dokumentasi penetapan kawasan hutan.	1 Judul
5433.005.	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.	Terselesaikannya seluruh proses permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan.	44 Pemohon

Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

Jumlah

Anggaran

Rp. 1.448.825.000,- (Satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Rp. 27.001.002.000,- (Dua puluh tujuh milyar satu juta dua ribu rupiah).

Rp. 28.449.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Direktur Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan,



Herban Heryandana, S.Hut, M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.
Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.
NIP. 19690114 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
**SATUAN KERJA : 465013. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**
**ESELON II : DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH
DAN SEKTOR**

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi.	.
5432.950.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.	Terlakannya dukungan manajemen Eselon I.	1 Layanan
5432.950.002.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lingkup Direktorat Teknis.	Terlakannya dukungan manajemen pelaksanaan tugas lingkup Direktorat PDLKWS.	1 Layanan
		055. Dukungan manajemen Direktorat PDLKWS.	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran.	Terlakannya kebutuhan kantor operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
		002. Operasional dan pemeliharaan kantor.	1 Layanan
5436.	Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor.	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor.	.
5436.002.	Dokumen KLHS Yang Terjamin Kualitasnya.	Terlaksananya KLHS bagi semua RTRW, RPJP dan RPJM, RZWP3K dan KRP prioritas di tingkat nasional dan daerah.	21 Dokumen KLHS
5436.004.	RPPLH Nasional Yang Tersusun, Ditetapkan dan Menjadi Acuan Pemerintah.	Terlaksananya penerapan RPPLH pada dokumen perencanaan pusat dan daerah.	1 Dokumen
5436.010.	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan Dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Dengan Air.	Teridentifikasinya informasi geospasial kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air.	65 Juta Ha

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Rp. 705.998.000,- (Tujuh ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor.	Rp. 5.987.759.000,- (Lima milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
Jumlah	Rp. 6.693.757.000,- (Enam milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Direktur Pencegahan Dampak
Lingkungan Kebijakan Wilayah
dan Sektor,

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.
NIP. 19690114 199603 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pernando L. Tobing, S.P., M.Si.
Jabatan : Plh. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I
Medan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Pernando L. Tobing, S.P., M.Si.
NIP. 19740323 199503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
 SATUAN KERJA : 238471. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I MEDAN

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Satker BPKH.	
5432.951.	Layanan sarana dan prasarana internal Satker BPKH.	Terlayaninya sarana dan prasarana Satker.	1 Layanan
5432.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terlayaninya dukungan manajemen Satker.	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran	Terlayaninya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji berserta tunjangannya dan operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Wilayah Kerja BPKH.	
5433.006.	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	Data dan informasi hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	1 Dokumen
5433.007.	Panjang batas yang telah diselesaikan ha-hak pihak ketiga	Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang telah dilakukan pemancangan batas kawasan hutannya.	403 Km
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH di wilayah kerja BPKH.	
5434.004.	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	4 Klaster
5434.005.	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	1 Dokumen
5435.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayaninya permohonan penggunaan KH khususnya dalam rangka ketahanan energi, pagan dan air di wilayah kerja BPKH.	
5435.013.	Hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Tersedianya data dan informasi hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH.	1 Laporan

Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Jumlah

Anggaran

Rp. 9.088.188.000,- (Sembilan miliar delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Rp. 8.056.476.000,- (Delapan miliar lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Rp. 549.916.000,- (Lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Rp. 524.512.000,- (Lima ratus dua puluh empat juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

Rp. 18.219.092.000,- (Delapan belas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah).

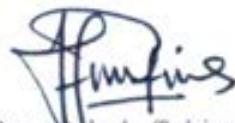
Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Plh. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan,



Pernando L. Tobing, S.P., M.Si.
NIP. 19740323 199503 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Manifas Zubayr, S.Hut., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II
Palembang
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Dr. Manifas Zubayr, S.Hut., M.Si.
NIP. 19690805 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
 SATUAN KERJA : 238535. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II
 PALEMBANG

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Satker BPKH.	
5432.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terlaiyannya dukungan manajemen Satker.	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran	Terlaiyannya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji berserta tunjangannya dan operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Wilayah Kerja BPKH.	
5433.006.	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	Data dan informasi hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	1 Dokumen
5433.007.	Panjang batas yang telah diselesaikan ha-hak pihak ketiga	Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang telah dilakukan pemancangan batas kawasan hutannya.	315 Km
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH di wilayah kerja BPKH.	
5434.004.	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	4 Klaster
5434.005.	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	1 Dokumen
5435.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlaiyannya permohonan penggunaan KH khususnya dalam rangka ketahanan energi, pagan dan air di wilayah kerja BPKH.	
5435.012	KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di wilayah kerja BPKH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di wilayah kerja BPKH	2 KPH

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5435.013.	Hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Tersedianya data dan informasi hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH.	1 Laporan

Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Jumlah

Anggaran

Rp. 8.978.873.000,- (Delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Rp. 7.786.938.000,- (Tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Rp. 523.930.000,- (Lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Rp. 1.488.158.000,- (Satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Rp. 16.797.624.000,- (Enam belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah II Palembang,



Dr. Manifas Zubayr, S.Hut., M.Si.
NIP. 19690805 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novie Trionoadi, S.Si., M.Sc.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III
Pontianak

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,



Novie Trionoadi, S.Si., M.Sc.
NIP. 19711129 199703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN KERJA : 427394. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH III
PONTIANAK

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Satker BPKH.	
5432.951.	Layanan sarana dan prasarana internal Satker BPKH.	Terlayaninya sarana dan prasarana Satker.	1 Layanan
5432.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terlayaninya dukungan manajemen Satker.	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran	Terlayaninya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji berserta tunjangannya dan operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Wilayah Kerja BPKH.	
5433.006.	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	Data dan informasi hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	2 Dokumen
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH di wilayah kerja BPKH.	
5434.004.	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	15 Klaster
5434.005.	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	1 Dokumen
5435.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayaninya permohonan penggunaan KH khususnya dalam rangka ketahanan energi, pagan dan air di wilayah kerja BPKH.	
5435.012	KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di wilayah kerja BPKH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di wilayah kerja BPKH	3 KPH
5435.013.	Hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Tersedianya data dan informasi hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH.	7 Laporan

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Rp. 8.690.281.000,- (Delapan miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan	Rp. 3.589.807.000,- (Tiga miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp. 1.028.299.000,- (Satu miliar dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rp. 2.066.897.000,- (Dua miliar enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
Jumlah	Rp. 15.375.284.000,- (Lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003



Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah III Pontianak,

Novie Triyonoadi, S.Si., M.Sc.
NIP. 19711129 199703 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Tarticius Kustanto
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda
selanjutnya disebut pihak pertama;

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Drs. Tarticius Kustanto
NIP. 19640712 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IV SAMARINDA

No./Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Satker	
5432.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Satker	Terlaiyannya Sarana dan Prasarana Satker	13 Layanan
5432.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terlaiyannya Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
5432.994	Layanan Perkantoran	Terlaiyannya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji, tunjangan, operasional pimpinan dan kantor	1 Layanan
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan di Wilayah Satker	
5433.006	Dokumen hasil Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan Hutan di Wilayah Satker	Data dan Informasi hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan Hutan di Wilayah Satker	1 Dokumen
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedianya dan termutakhiran data dan informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Satker	
5434.004	Data dan informasi Sumber Daya Hutan hasil Inventarisasi Hutan di Wilayah Satker	Tersedianya data Informasi Sumber Daya Hutan hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Satker	10 Klaster
5434.005	Data dan Informasi Pemantauan Sumber Daya Hutan di Wilayah Satker	Tersedianya data dan informasi pemantauan Sumber Daya Hutan di Wilayah Satker	1 Dokumen
5435	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlaiyannya permohonan penggunaan Kawasan Hutan dalam rangka ketahanan energi, pangan dan air di Wilayah Satker	
543.012	Jumlah KPH yang memiliki Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Satker	Tersedianya data dan informasi KPH yang memiliki Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Satker	1 KPH
5435.013	Hasil verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Satker	Tersedianya data dan informasi hasil verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Satker	21 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Rp. 10.433.477.000,- (<i>sepuluh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah</i>).
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp. 1.115.715.000,- (<i>satu milyar seratus lima belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah</i>).
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rp. 2.361.248.000,- (<i>satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah</i>).
Jumlah	Rp. 13.967.392.000,- (<i>tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah</i>).

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai,

Drs. Tarticius Kustanto
NIP. 19640712 199203 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Heryadi, M.M.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V
Banjarbaru
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama

Ir. Heryadi, M.M.
NIP. 19630415 199003 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN KERJA : 239963. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH V
BANJARBARU

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Satker BPKH.	
5432.951.	Layanan sarana dan prasarana internal Satker BPKH.	Terlayaninya sarana dan prasarana Satker.	1 Layanan
5432.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terlayaninya dukungan manajemen Satker.	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran	Terlayaninya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji berserta tunjangannya dan operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Wilayah Kerja BPKH.	
5433.007.	Panjang batas yang telah diselesaikan ha-hak pihak ketiga	Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang telah dilakukan pemancangan batas kawasan hutannya.	375 Km
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH di wilayah kerja BPKH.	
5434.004.	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	6 Klaster
5434.005.	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	1 Dokumen
5435.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayaninya permohonan penggunaan KH khususnya dalam rangka ketahanan energi, pagan dan air di wilayah kerja BPKH.	
5435.013.	Hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Tersedianya data dan informasi hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH.	28 Laporan

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Rp. 10.313.727.000,- (Sepuluh miliar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan	Rp. 3.036.971.000,- (Tiga miliar tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp. 514.615.000,- (Lima ratus empat belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rp. 1.063.696.000,- (Satu miliar enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
Jumlah	Rp. 14.929.009.000,- (Empat belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ribu rupiah)

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemanfaatan Kawasan
Hutan Wilayah V Banjarbaru,

Heryadi, M.M.
NIP. 19630415 199003 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Pernando Sinabutar, S.Hut, M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah VI
Manado
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,



Dr. Pernando Sinabutar, S.Hut, M.Si.
NIP. 19720131 199903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN KERJA : 427417. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VI
MANADO

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Satker BPKH.	
5432.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terlonyaninya dukungan manajemen Satker.	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran	Terlonyaninya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji berserta tunjangannya dan operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Wilayah Kerja BPKH.	
5433.006.	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	Data dan informasi hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	1 Dokumen
5433.007.	Panjang batas yang telah diselesaikan ha-hak pihak ketiga	Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang telah dilakukan pemancangan batas kawasan hutannya.	84 Km
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH di wilayah kerja BPKH.	
5434.004.	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	9 Klaster
5435.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlonyaninya permohonan penggunaan KH khususnya dalam rangka ketahanan energi, pagan dan air di wilayah kerja BPKH.	
5435.012	KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di wilayah kerja BPKH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di wilayah kerja BPKH	2 KPH
5435.013.	Hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Tersedianya data dan informasi hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH.	10 Laporan

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Rp. 8.412.550.000,- (Delapan miliar empat ratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan	Rp. 1.518.085.000,- (Satu miliar lima ratus delapan belas juta delapan puluh lima ribu rupiah).
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp. 605.775.000,- (Enam ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rp. 1.916.319.000,- (Satu miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).
Jumlah	Rp. 12.452.729.000,- (Dua belas miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah VI Manado,



Dr. Pernando Sinabutar, S.Hut, M.Si.
NIP. 19720131 199903 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hariani Samal, S.Hut., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII
Makassar
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Hariani Samal, S.Hut., M.Si.
NIP. 19731011 199803 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN KERJA : 238631. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII
MAKASSAR

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Satker BPKH.	
5432.951.	Layanan sarana dan prasarana internal Satker BPKH.	Terlayaninya sarana dan prasarana Satker.	1 Layanan
5432.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terlayaninya dukungan manajemen Satker.	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran	Terlayaninya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji berserta tunjangannya dan operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Wilayah Kerja BPKH.	
5433.006.	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	Data dan informasi hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	1 Dokumen
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH di wilayah kerja BPKH.	
5434.004.	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	16 Klaster
5434.005.	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	1 Dokumen
5435.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayaninya permohonan penggunaan KH khususnya dalam rangka ketahanan energi, pagan dan air di wilayah kerja BPKH.	
5435.013.	Hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Tersedianya data dan informasi hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH.	8 Laporan

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Rp. 10.060.929.000,- (Sepuluh milyar enam puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan	Rp. 4.216.841.000,- (Empat milyar dua ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp. 1.309.452.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rp. 511.550.000,- (Lima ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
Jumlah	Rp. 16.098.772.000,- (Enam belas milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah VII Makassar,



Hariani Samal, S.Hut., M.Si.
NIP. 19731011 199803 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Gusti Raka Wisnu, S.P., M.P.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII
Denpasar
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,



I Gusti Raka Wisnu, S.P., M.P.
NIP. 19630824 198603 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN KERJA : 238670. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII
DENPASAR

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Satker BPKH.	
5432.951.	Layanan sarana dan prasarana internal Satker BPKH.	Terlayaninya sarana dan prasarana Satker.	1 Layanan
5432.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terlayaninya dukungan manajemen Satker.	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran	Terlayaninya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji berserta tunjangannya dan operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Wilayah Kerja BPKH.	
5433.008.	Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	Dokumen Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH	1 Dokumen
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH di wilayah kerja BPKH.	
5434.004.	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	10 Klaster
5434.005.	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	1 Dokumen
5435.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayaninya permohonan penggunaan KH khususnya dalam rangka ketahanan energi, pangan dan air di wilayah kerja BPKH.	
5435.013.	Hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Tersedianya data dan informasi hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH.	1 Laporan

Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Jumlah

Anggaran

Rp. 8.590.953.000,- (Delapan miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Rp. 1.197.919.000,- (Satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).

Rp. 636.520.000,- (Enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Rp. 217.822.000,- (Dua ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Rp. 10.643.214.000,- (Sepuluh miliar enam ratus empat puluh tiga ratus dua ratus empat belas ribu rupiah)

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003



L. Gusti Raka Wisnu, S.P., M.P.
NIP. 19630824 198603 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zuhdan Arief F, S.Hut., MT, MSc.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Ambon
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Zuhdan Arief F, S.Hut., MT, M.Sc.
NIP. 19770314 200312 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN KERJA : 427401. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH IX
AMBON

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Satker BPKH.	
5432.951.	Layanan sarana dan prasarana internal Satker BPKH.	Terlayaninya sarana dan prasarana Satker.	1 Layanan
5432.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terlayaninya dukungan manajemen Satker.	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran	Terlayaninya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji berserta tunjangannya dan operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Wilayah Kerja BPKH.	
5433.006.	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	Data dan informasi hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	1 Dokumen
5433.007.	Panjang batas yang telah diselesaikan ha-hak pihak ketiga	Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang telah dilakukan pemancangan batas kawasan hutannya.	67 Km
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH di wilayah kerja BPKH.	
5434.004.	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	6 Klaster
5434.005.	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	1 Dokumen
5435.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayaninya permohonan penggunaan KH khususnya dalam rangka ketahanan energi, pagan dan air di wilayah kerja BPKH.	
5435.012	KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di wilayah kerja BPKH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di wilayah kerja BPKH	2 KPH

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Rp. 9.106.142.000,- (Sembilan milyar seratus enam juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan	Rp. 2.648.017.000,- (Dua milyar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh belas ribu rupiah).
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp. 333.060.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah).
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rp. 514.797.000,- (Lima ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
Jumlah	Rp. 12.602.016.000,- (Dua belas milyar enam ratus dua juta enam belas ribu rupiah)

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah IX Ambon,



Zuhra Arief F. S.Hut.,M.T, M.Sc.
NIP. 19770314 200312 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Arnold Manting
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X
Jayapura
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Arnold Manting
NIP. 19650430 199203 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN KERJA : 239970. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH X
JAYAPURA

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Satker BPKH.	
5432.951.	Layanan sarana dan prasarana internal Satker BPKH.	Terlayaninya sarana dan prasarana Satker.	1 Layanan
5432.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terlayaninya dukungan manajemen Satker.	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran	Terlayaninya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji berserta tunjangannya dan operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Wilayah Kerja BPKH.	
5433.006.	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	Data dan informasi hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	2 Dokumen
5433.007.	Panjang batas yang telah diselesaikan ha-hak pihak ketiga	Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang telah dilakukan pemancangan batas kawasan hutannya.	3.309 Km
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH di wilayah kerja BPKH.	
5434.004.	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	6 Klaster
5434.005.	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	1 Dokumen
5435.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayaninya permohonan penggunaan KH khususnya dalam rangka ketahanan energi, pagan dan air di wilayah kerja BPKH.	
5435.013.	Hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Tersedianya data dan informasi hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH.	1 Laporan

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Rp. 8.171.258.000,- (Delapan milyar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan	Rp. 34.030.826.000,- (Tiga puluh empat milyar tiga puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp. 543.055.000,- (Lima ratus empat puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah).
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rp. 146.320.000,- (Seratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
Jumlah	Rp. 42.891.459.000,- (Empat puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah X Jayapura,



Ir. Arnold Manting
NIP. 19650430 199203 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suhendro A. Basori, S.Hut.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI
Yogyakarta

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003



Suhendro A. Basori, S.Hut.
NIP. 19690416 199403 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
 SATUAN KERJA : 649877. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XI
 YOGYAKARTA

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Satker BPKH.	
5432.951.	Layanan sarana dan prasarana internal Satker BPKH.	Terlayaninya sarana dan prasarana Satker.	1 Layanan
5432.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terlayaninya dukungan manajemen Satker.	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran	Terlayaninya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji berserta tunjangannya dan operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Wilayah Kerja BPKH.	
5433.008.	Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH.	Dokumen Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH.	1 Dokumen
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH di wilayah kerja BPKH.	
5434.004.	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	14 Klaster
5434.005.	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	1 Dokumen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Rp. 11.395.940.000,- (Sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan	Rp. 512.320.000,- (Lima ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp. 714.339.000,- (Tujuh ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
Jumlah	Rp. 12.622.599.000,- (Dua belas miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Badan Pemanfaatan Kawasan
Hutan Wilayah XI Yogyakarta,



Suhendar A. Basori, S.Hut.
NIP. 19690416 199403 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Tridjoko
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII
Tanjung Pinang.
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Oktober 2020

Pihak Kedua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sigit Hardwinarto".

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tridjoko".

Ir. Tridjoko
NIP. 19640403 199203 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN KERJA : 439649. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII
TANJUNG PINANG

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Satker BPKH.	
5432.951.	Layanan sarana dan prasarana internal Satker BPKH.	Terlalayannya sarana dan prasarana Satker.	1 Layanan
5432.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terlalayannya dukungan manajemen Satker.	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran	Terlalayannya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji berserta tunjangannya dan operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Wilayah Kerja BPKH.	
5433.007.	Panjang batas yang telah diselesaikan ha-hak pihak ketiga	Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang telah dilakukan pemancangan batas kawasan hutannya.	80 Km
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH di wilayah kerja BPKH.	
5434.004.	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	6 Klaster
5434.005.	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	1 Dokumen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Rp. 5.820.865.000,- (Lima miliar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan	Rp. 794.335.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp. 475.333.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
Jumlah	Rp. 7.090.533.000,- (Tujuh miliar sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Jakarta, 19 Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang,



Ir. Tridjoko
NIP. 19640403 199203 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mursid Wibawa, S.Si., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII
Pangkal Pinang
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sigit Hardwinarto".

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mursid Wibawa".

Mursid Wibawa, S.Si., M.Si.
NIP. 19680227 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
 SATUAN KERJA : 439655. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIII
 PANGKAL PINANG

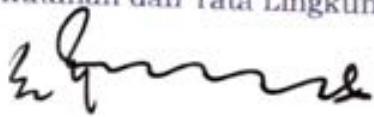
No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Satker BPKH.	
5432.951.	Layanan sarana dan prasarana internal Satker BPKH.	Terlayaninya sarana dan prasarana Satker.	1 Layanan
5432.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terlayaninya dukungan manajemen Satker.	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran	Terlayaninya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji berserta tunjangannya dan operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Wilayah Kerja BPKH.	
5433.007.	Panjang batas yang telah diselesaikan ha-hak pihak ketiga	Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang telah dilakukan pemancangan batas kawasan hutannya.	2,46 Km
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH di wilayah kerja BPKH.	
5434.004.	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	10 Klaster
5434.005.	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	1 Dokumen
5435.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayaninya permohonan penggunaan KH khususnya dalam rangka ketahanan energi, pagan dan air di wilayah kerja BPKH.	
5435.013.	Hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Tersedianya data dan informasi hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH.	1 Laporan

Kegiatan**Anggaran**

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Rp. 5.926.544.000,- (Lima milyar sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).
Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan	Rp. 1.556.117.000,- (Satu milyar lima ratus lima puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah).
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp. 677.099.000,- (Enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rp. 315.550.000,- (Tiga ratus lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
Jumlah	Rp. 8.475.310.000,- (Delapan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

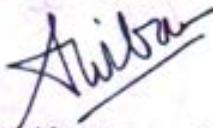
Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XIII Pangkal Pinang,



Mursid Wibawa, S.Si., M.Si.
NIP. 19680227 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Moech Firman Fahada, M.P.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV
Kupang
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Moech Firman Fahada, M.P.
NIP. 19680215 199703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN KERJA : 439661. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIV
KUPANG

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Satker BPKH.	
5432.951.	Layanan sarana dan prasarana internal Satker BPKH.	Terlayaninya sarana dan prasarana Satker.	1 Layanan
5432.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terlayaninya dukungan manajemen Satker.	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran	Terlayaninya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji berserta tunjangannya dan operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Wilayah Kerja BPKH.	
5433.006.	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	Data dan informasi hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	1 Dokumen
5433.007.	Panjang batas yang telah diselesaikan ha-hak pihak ketiga	Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang telah dilakukan pemancangan batas kawasan hutannya.	61 Km
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH di wilayah kerja BPKH.	
5434.004.	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	10 Klaster
5434.005.	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	1 Dokumen
5435.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayaninya permohonan penggunaan KH khususnya dalam rangka ketahanan energi, pagan dan air di wilayah kerja BPKH.	
5435.013.	Hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Tersedianya data dan informasi hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH.	2 Laporan

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Rp. 6.254.326.000,- (Enam milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan	Rp. 1.611.968.000,- (Satu milyar enam ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp. 870.385.000,- (Delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rp. 124.220.000,- (Seratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
Jumlah	Rp. 8.860.899.000,- (Delapan milyar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XIV Kupang,

Ir. Moech Firman Fahada, M.P.
NIP. 19680215 199703 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Setiawan, S.Hut., M.Sc.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV
Gorontalo
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sigit Hardwinarto".

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andi Setiawan".

Andi Setiawan, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19741024 200003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN KERJA : 439670. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XV
GORONTALO

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Satker BPKH.	
5432.951.	Layanan sarana dan prasarana internal Satker BPKH.	Terlayaninya sarana dan prasarana Satker.	1 Layanan
5432.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terlayaninya dukungan manajemen Satker.	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran	Terlayaninya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji berserta tunjangannya dan operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Wilayah Kerja BPKH.	
5433.006.	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	Data dan informasi hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	1 Dokumen
5433.007.	Panjang batas yang telah diselesaikan ha-hak pihak ketiga	Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang telah dilakukan pemancangan batas kawasan hutannya.	8,4 Km
5433.008.	Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	Dokumen Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH	1 Dokumen
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH di wilayah kerja BPKH.	
5434.004.	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	7 Klaster
5434.005.	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	1 Dokumen

No./Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5435.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayaninya permohonan penggunaan KH khususnya dalam rangka ketahanan energi, pagan dan air di wilayah kerja BPKH.	
5435.013.	Hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Tersedianya data dan informasi hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH.	1 Laporan

Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Jumlah

Anggaran

Rp. 6.391.371.000,- (Enam milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Rp. 836.237.000,- (Delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Rp. 729.655.000,- (Tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Rp. 102.760.000,- (Seratus dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Rp. 8.060.023.000,- (Delapan milyar enam puluh juta dua puluh tiga ribu rupiah).

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo,

Andi Setiawan, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19741024 200003 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Heri Sunuprapto, M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,



Dr. Heri Sunuprapto, S.Si., M.Sc.
NIP. 19670527 199503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN KERJA : 439686. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVI PALU

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Satker BPKH.	
5432.951.	Layanan sarana dan prasarana internal Satker BPKH.	Terlayaninya sarana dan prasarana Satker.	1 Layanan
5432.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terlayaninya dukungan manajemen Satker.	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran	Terlayaninya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji berserta tunjangannya dan operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Wilayah Kerja BPKH.	
5433.006.	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	Data dan informasi hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	1 Dokumen
5433.007.	Panjang batas yang telah diselesaikan ha-hak pihak ketiga	Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang telah dilakukan pemarcangan batas kawasan hutannya.	430 Km
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH di wilayah kerja BPKH.	
5434.004.	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	20 Klaster
5434.005.	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	1 Dokumen
5435.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayaninya permohonan penggunaan KH khususnya dalam rangka ketahanan energi, pagan dan air di wilayah kerja BPKH.	
5435.012	KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di wilayah kerja BPKH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di wilayah kerja BPKH	1 KPH

No./Kode	Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5435.013.	Hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Tersedianya data dan informasi hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH.	5 Laporan

Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Jumlah

Anggaran

Rp. 9.153.082.000,- (Sembilan milyar seratus lima puluh tiga juta delapan puluh dua ribu rupiah).

Rp. 3.788.384.000,- (Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Rp. 1.671.975.000,- (Satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Rp. 987.670.000,- (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Rp. 15.601.111.000,- (Lima belas milyar enam ratus satu juta seratus sebelas ribu rupiah).

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003



Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XVI Palu,

Dr. Msi. Sunuprapto, S.Si., M.Sc.
NIP. 19670527 199503 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fedrik Ap, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Plt. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII
Manokwari
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Fedrik Ap, S.Sos., M.Si.
NIP. 19780227 200212 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

SATUAN KERJA : 439692. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVII
MANOKWARI

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Satker BPKH.	
5432.951.	Layanan sarana dan prasarana internal Satker BPKH.	Terlayaninya sarana dan prasarana Satker.	41 Layanan
5432.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terlayaninya dukungan manajemen Satker.	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran	Terlayaninya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji berserta tunjangannya dan operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Wilayah Kerja BPKH.	
5433.006.	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	Data dan informasi hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	1 Dokumen
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH di wilayah kerja BPKH.	
5434.004.	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	10 Klaster
5434.005.	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	1 Dokumen

Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Jumlah

Anggaran

Rp. 7.606.151.000,- (Tujuh milyar enam ratus enam juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Rp. 1.225.790.000,- (Satu milyar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Rp. 988.896.000,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Rp. 9.820.837.000,- (Sembilan milyar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Jakarta, Oktober 2020

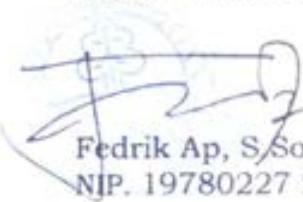
Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Plt. Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XVII Manokwari,

Fredrik Ap, S.Sos., M.Si.
NIP. 19780227 200212 1 005





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Toto Prabowo, S.Hut., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII
Banda Aceh
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Toto Prabowo, S.Hut., M.Si.
NIP. 19721004 200003 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
 SATUAN KERJA : 065132. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XVIII
 BANDA ACEH

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Satker BPKH.	
5432.951.	Layanan sarana dan prasarana internal Satker BPKH.	Terlayaninya sarana dan prasarana Satker.	1 Layanan
5432.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terlayaninya dukungan manajemen Satker.	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran	Terlayaninya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji berserta tunjangannya dan operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Wilayah Kerja BPKH.	
5433.006.	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	Data dan informasi hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	2 Dokumen
5433.007.	Panjang batas yang telah diselesaikan ha-hak pihak ketiga	Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang telah dilakukan pemancangan batas kawasan hutannya.	25 Km
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH di wilayah kerja BPKH.	
5434.004.	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	9 Klaster

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Rp. 5.250.200.000,- (Lima milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah).
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Rp. 1.833.382.000,- (Satu milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp. 582.520.000,- (Lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
Jumlah	Rp. 7.666.102.000,- (Tujuh milyar enam ratus enam puluh enam juta seratus dua ribu rupiah).

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh,

Toto Prabowo, S.Hut., M.Si.
NIP. 19721004 200003 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sofyan, S.Hut., M.Sc.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX
Pekanbaru

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Sofyan, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19771231 200212 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
 SATUAN KERJA : 095154. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XIX
 PEKANBARU

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Satker BPKH.	
5432.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terlanyarnya dukungan manajemen Satker.	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran	Terlanyarnya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji berserta tunjangannya dan operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Wilayah Kerja BPKH.	
5433.006.	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	Data dan informasi hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	1 Dokumen
5433.007.	Panjang batas yang telah diselesaikan ha-hak pihak ketiga	Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang telah dilakukan pemancangan batas kawasan hutannya.	200 Km
5435.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlanyarnya permohonan penggunaan KH khususnya dalam rangka ketahanan energi, pagan dan air di wilayah kerja BPKH.	
5435.012	KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di wilayah kerja BPKH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di wilayah kerja BPKH	4 KPH
5435.013.	Hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Tersedianya data dan informasi hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH.	4 Laporan

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Rp. 5.449.127.000,- (Lima miliar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan	Rp. 3.607.504.000,- (Tiga miliar enam ratus tujuh juta lima ratus empat ribu rupiah).
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rp. 510.337.000,- (Lima ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
Jumlah	Rp. 9.566.968.000,- (Sembilan miliar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XIX Pekanbaru,

Sofyan, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19771231 200212 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Maryuna Pabutungan, M.P.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX
Bandar Lampung
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003



Pihak Pertama,

Ir. Maryuna Pabutungan, M.P.
NIP. 19670919 199303 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN KERJA : 125165. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XX
BANDAR LAMPUNG

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Satker BPKH.	
5432.951.	Layanan sarana dan prasarana internal Satker BPKH.	Terlayaninya sarana dan prasarana Satker.	1 Layanan
5432.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terlayaninya dukungan manajemen Satker.	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran	Terlayaninya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji berserta tunjangannya dan operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Wilayah Kerja BPKH.	
5433.006.	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	Data dan informasi hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	1 Dokumen
5433.007.	Panjang batas yang telah diselesaikan ha-hak pihak ketiga	Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang telah dilakukan pemancangan batas kawasan hutannya.	17 Km
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH di wilayah kerja BPKH.	
5434.004.	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	8 Klaster
5434.005.	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	1 Dokumen
5435.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayaninya permohonan penggunaan KH khususnya dalam rangka ketahanan energi, pagan dan air di wilayah kerja BPKH.	
5435.013.	Hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Tersedianya data dan informasi hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH.	3 Laporan

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Rp. 6.814.790.000,- (Enam milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan	Rp. 447.323.000,- (Empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga dua puluh tiga ribu rupiah).
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp. 772.178.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rp. 210.552.000,- (Dua ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)
Jumlah	Rp. 8.244.843.000,- (Delapan milyar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Doni Sri Putra, S.Hut., M.E.
Jabatan : Plt. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI
Palangkaraya
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003



Doni Sri Putra, S.Hut., M.E.
NIP. 19740909 19903 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
 SATUAN KERJA : 145160. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI
 PALANGKARAYA

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target
			(4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Satker BPKH.	
5432.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terlonyaninya dukungan manajemen Satker.	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran	Terlonyaninya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji berserta tunjangannya dan operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Wilayah Kerja BPKH.	
5433.006.	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	Data dan informasi hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	1 Dokumen
5433.007.	Panjang batas yang telah diselesaikan ha-hak pihak ketiga	Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang telah dilakukan pemancangan batas kawasan hutannya.	1.430Km
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH di wilayah kerja BPKH.	
5434.004.	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	5 Klaster
5435.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlonyaninya permohonan penggunaan KH khususnya dalam rangka ketahanan energi, pagan dan air di wilayah kerja BPKH.	
5435.013.	Hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Tersedianya data dan informasi hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH.	1 Laporan

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Rp. 5.810.537.000,- (Lima miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan	Rp. 16.901.121.000,- (Enam belas miliar sembilan ratus satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp. 294.345.000,- (Dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rp. 243.076.000,- (Dua ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah)
Jumlah	Rp. 23.249.079.000,- (Dua puluh tiga miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XXI Palangkaraya,



Dezri Sya'putra, S.Hut.,M.E.
NIP. 19740909 19903 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eddy Bambang Permadi, S.Sos., M.P.
Jabatan : Plt. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII
Kendari
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,



Eddy Bambang Permadi, S.Sos., M.P.
NIP. 19640527 199103 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN KERJA : 205105. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXII
KENDARI

No./Kode (1)	Kegiatan/Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
5432.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan Satker BPKH.	
5432.951.	Layanan sarana dan prasarana internal Satker BPKH.	Terlonyaninya sarana dan prasarana Satker.	14 Layanan
5432.970.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terlonyaninya dukungan manajemen Satker.	1 Layanan
5432.994.	Layanan Perkantoran	Terlonyaninya kebutuhan kantor berupa pembayaran gaji berserta tunjangannya dan operasional pimpinan dan kantor.	1 Layanan
5433.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Dokumen Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Wilayah Kerja BPKH.	
5433.006.	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	Data dan informasi hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam kawasan Hutan di Wilayah BPKH.	1 Dokumen
5433.007.	Panjang batas yang telah diselesaikan ha-hak pihak ketiga	Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang telah dilakukan pemancangan batas kawasan hutannya.	333 Km
5434.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH di wilayah kerja BPKH.	
5434.004.	Data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi SDH hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH.	20 Klaster
5434.005.	Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.	Tersedianya data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah kerja BPKH.-	1 Dokumen
5435.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlonyaninya permohonan penggunaan KH khususnya dalam rangka ketahanan energi, pagan dan air di wilayah kerja BPKH.	
5435.013.	Hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Tersedianya data dan informasi hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH.	1 Laporan

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Rp. 5.261.068.000,- (Lima milyar dua ratus enam puluh satu juta enam puluh delapan ribu rupiah).
Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan	Rp. 5.032.669.000,- (Lima milyar tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp. 1.050.309.000,- (Satu milyar lima puluh juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rp. 1.019.895.000,- (Satu milyar sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
Jumlah	Rp. 12.363.941.000,- (Dua belas milyar tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

Plt. Kepala Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah XXII Kendari,



Eddy Bambang Permadi, S.Sos., M.P.
NIP. 19640527 199103 1 005